

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI WILAYAH KARESIDENAN SURAKARTA

(Studi Kasus 7 Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta Tahun 2006-2017)

Marlinda Rahmawati

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: Marlindarahmawati26@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan dibantu *software* Eviews 10.0 dengan menggunakan data *time series* dari tahun 2006-2017. Metode analisis menggunakan data panel dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah penduduk

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of government spending, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and the number of residents on Regional Original Revenue (PAD) in the District / City of the Surakarta Residency. The data used in this study are secondary data and assisted by software Eviews 10.0 using time series data from 2006-2017. The analysis method uses panel data with a fixed effect approach (Fixed Effect Model). Based on the results of the analysis that has been done, the results of the research show that government expenditure variables and GDP variables have a positive and significant effect on Regional Original Income while the population variable has a positive but not significant effect on Regional Original Income.

Keywords: Regional Original Income (PAD), Government Expenditures, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and Population

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Menurut UU No 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan otonomi daerah berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas yaitu kepala daerah diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Prinsip otonomi nyata yaitu wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang ada sesuai dengan potensi daerah. Sementara itu, prinsip otonomi bertanggung jawab yaitu penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi hakikatnya merupakan penciptaan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan karena otonomi untuk kepentingan masyarakat di daerah dengan desentralisasi tersebut pemerintah memiliki peluang untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah berdasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lain yang sah. Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan ekonomi yang terjadi dan untuk mengetahui keberhasilan suatu

pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator yang membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja agar terlaksananya pembangunan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan kegiatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto. PDB adalah suatu acuan untuk mengukur pendapatan dan pengeluaran dalam suatu perekonomian dalam waktu tertentu dimana dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB berdasarkan pada harga konstan (*PDB rill*) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan adalah pertumbuhan rill karena atas pertumbuhan produksi (Mankiw, 2006:5). Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah juga tinggi. Apabila PDRB mengalami peningkatan maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan yang diharapkan akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya. Penambahan penduduk yang tinggi dan diikuti dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk adalah satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan juga meningkat Santosa dan Rahayu (2005).

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2017:53) jumlah penduduk di Jawa Tengah 34.257.865 jiwa. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terpadat

ketiga dengan jumlah penduduk terpadat dengan kepadatan 1.053 jiwa setiap kilometer persegi. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Karesidenan Surakarta yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yang memiliki ciri khas masing-masing yang meliputi sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan sumber daya alam berbeda yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah yang besar. Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan setiap tahun. Agar pendapatan maksimal, pemerintah harus terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2016) diperoleh hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Rani (2016) juga melakukan penelitian dengan diperoleh hasil Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta sebagai penulisan karya ilmiah atau skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta”.

Landasan Teori

1. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Menurut UU Nomor UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- a. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, pemborosan sumberdaya dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas perekonomian daerah.
- e. Fungsi distribusi adalah kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus adil.

- f. Fungsi stabilitasi adalah anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal bahwa Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004), Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah terbagi menjadi empat jenis pendapatan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah. Dalam meningkatkan pendapatan daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan juga kegiatan ekspor dan impor.

METODE PENELITIAN

A. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Karesidenan Surakarta yang meliputi 7 Kabupaten/Kota, yaitu Surakarta, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo dan Wonogiri. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah sedangkan variabel independennya adalah Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data panel. Data yang digunakan antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk. Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang pengaruh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Sekarisidenan Surakarta Tahun 2006-2017.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang sesuai dan bersangkutan dengan variabel penelitian yang diujikan secara sistematis sesuai dengan tahun penelitian dari berbagai sumber yang terkait. Penelitian menggunakan referensi dari buku-buku, internet, jurnal dan artikel yang terkait dengan penelitian. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2006-2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah sedangkan variabel bebasnya adalah Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk.

E. Metode Analisis Data

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan model panel data. Analisis dengan menggunakan regresi data panel adalah dengan menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Analisis regresi data panel digunakan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel independen yang digunakan dalam meneliti Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karisidenan Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Model

1. Uji Chow

Tabel 5.1
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	11.500218	(6.74)	0.0000
Cross-section Chi-Square	55.338250	6	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data panel

Berdasarkan tabel 5.1, diketahui nilai probabilitas Cross-section F dan Cross-section Chi-Square adalah 0.0000 atau kurang dari $\alpha = 0,05$. Metode estimasi data panel yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Setelah ditemukan hasil pada uji chow ini selanjutnya melakukan uji hausman.

2. Uji Hausman

Tabel 5.2
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	25.753.766	3	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data panel

Berdasarkan pengujian pada tabel, diketahui nilai probabilitas dari Cross-section random pada uji hausman ini sebesar 0.0000 atau kurang dari $\alpha = 0,05$. Jadi model estimasi data panel yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

B. Hasil Estimasi Model Regresi Panel

Setelah dilakukan pengujian untuk mendapatkan model estimasi regresi data panel, hasil pengujian menyatakan bahwa metode pendekatan dengan menggunakan *Fixed Effect Model* adalah model terbaik untuk menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen pada analisis data panel ini. Hasil estimasi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah, Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk pada 7 Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta Tahun 2006-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel Dependen	Model
LOG(PAD)	Fixed Effect
Konstanta	-87.80206
Standar error	16.72140
Probabilitas	0.000000
LOG(PP)	0.646141
Standar error	0.210396
Probabilitas	0.0030
LOG(PDRB)	2.309923
Standar error	0.430623
Probabilitas	0.0000
LOG(JP)	1.824820
Standar error	1.116241
Probabilitas	0.1063
R^2	0.960935
Adjusted R^2	0.956183
$F_{statistik}$	202.2513
Probabilitas	0.000000
Durbin-Watson stat	1.009641

Sumber: Hasil pengolahan data panel

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah disetiap

Kabupaten dan Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta yang diinterpretasikan sebagai berikut:

$$\text{LOG (PAD)} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOG(PP?)} + \beta_2 \text{LOG(PDRB?)} + \beta_3 \text{LOG(JP?)} + \varepsilon$$

Keterangan:

LOG(PAD) = Pendapatan Asli Daerah

LOG(PP?) = Pengeluaran Pemerintah

LOG(PDRB?) = Produk Domestik Regional Bruto

LOG(JP?) = Jumlah Penduduk

β_0 = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien Variabel PP, PDRB, dan JP

ε = Error

Dimana diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

$$\text{LOG (PAD)} = -87.80206 + 0.646141 \text{LOG(PP?)} + 2.309923 \text{LOG(PDRB?)} + 1.824820 \text{LOG(JP?)} + \varepsilon$$

$\beta_0 = -87.80206$ dapat diartikan bahwa jika seluruh variabel jumlah penduduk, PDRB, dan pengeluaran pemerintah dianggap konstan atau nol maka PAD mengalami kenaikan sebesar $1,57 \times 10^{-88}$ persen.

$\beta_1 = 0.646141$ dapat diartikan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila Pengeluaran Pemerintah meningkat sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,646141 % dengan asumsi faktor lain dianggap tetap.

$\beta_2 = 2,309923$ dapat diartikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila Produk

Domestik Regional Bruto meningkat sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 2,309923% dengan asumsi faktor lain dianggap tetap.

$\beta_3 = 1,824820$ dapat diartikan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 1,824820% dengan asumsi faktor lain dianggap tetap.

Berdasarkan Tabel, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah disetiap Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta yang diinterpretasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LOG}_{(\text{PAD SURAKARTA})} = & 0.794043686558 - 87.8020626457 + 0.646141457673 * \text{LOG}_{(\text{PP} \\ & \text{SURAKARTA})} + 2.3099234077 * \text{LOG}_{(\text{PDRB SURAKARTA})} + \\ & 1.82481964171 * \text{LOG}_{(\text{JP SURAKARTA})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}_{(\text{PAD SRAGEN})} = & 0.011899799027 - 87.8020626457 + 0.646141457673 * \text{LOG}_{(\text{PP} \\ & \text{SRAGEN})} + 2.3099234077 * \text{LOG}_{(\text{PDRB SRAGEN})} + \\ & 1.82481964171 * \text{LOG}_{(\text{JP SRAGEN})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}_{(\text{PAD BOYOLALI})} = & 0.161945520579 - 87.8020626457 + 0.646141457673 * \text{LOG}_{(\text{PP} \\ & \text{BOYOLALI})} + 2.3099234077 * \text{LOG}_{(\text{PDRB BOYOLALI})} \\ & + 1.82481964171 * \text{LOG}_{(\text{JP BOYOLALI})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}_{(\text{PAD KARANGANYAR})} = & 0.041417314578 - 87.8020626457 + \\ & 0.646141457673 * \text{LOG}_{(\text{PP KARANGANYAR})} + 2.3099234077 \\ & * \text{LOG}_{(\text{PDRB KARANGANYAR})} + 1.82481964171 * \text{LOG}_{(\text{JP} \\ & \text{KARANGANYAR})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}_{(\text{PAD KLATEN})} = & -1.04805344756-87.8020626457+0.646141457673 * \text{LOG}_{(\text{PP} \\ & \text{KLATEN})} +2.3099234077* \text{LOG}_{(\text{PDRB KLATEN})} + \\ & 1.82481964171* \text{LOG}_{(\text{JP KLATEN})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}_{(\text{PAD SUKOHARJO})} = & 0.0145648270933-87.8020626457+ 0.646141457673* \text{LOG}_{(\text{PP} \\ & \text{SUKOHARJO})}+2.3099234077 * \text{LOG}_{(\text{PDRB} \\ & \text{SUKOHARJO})}+1.82481964171* \text{LOG}_{(\text{JP SUKOHARJO})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}_{(\text{PAD WONOGIRI})} = & 0.0241822997296-87.8020626457+0.646141457673 * \text{LOG}_{(\text{PP} \\ & \text{WONOGIRI})}+2.3099234077* \text{LOG}_{(\text{PDRB WONOGIRI})} + \\ & 1.82481964171* \text{LOG}_{(\text{JP WONOGIRI})} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan diatas, hasil analisis Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta menggunakan *Fixed Effect Model* memiliki koefisien yang berbeda-beda. Artinya bahwa setiap Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta mengalami perubahan PAD yang berbeda apabila variabel independen (Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengeluaran Pemerintah) dikeluarkan dari model.

C.Uji Kualitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan masalah regresi yang faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. Apabila probabilitas >0.05 maka variabel independen tidak mengandung heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode dengan Uji *Breusch-PaganGodfre* untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 5.4
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji *Breusch-PaganGodfre*

Variabel	Probabilitas
C	0.1899

LOGPP?	0.4654
LOGPDRB?	0.3653
LOGJP?	0.0609

Sumber: Hasil pengolahan data panel

Berdasarkan tabel 5.4, dapat disimpulkan bahwa data variabel independen yang digunakan dalam penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Nilai probabilitas seluruh variabel lebih dari 0,05 (5%). Probabilitas dari Konstanta (C) sebesar 0,1899, probabilitas dari Pengeluaran Pemerintah (LOGPP?) sebesar 0,4654, probabilitas dari Produk Domestik Regional Bruto (LOGPDRB?) sebesar 0,3653 dan probabilitas dari Jumlah Penduduk (LOGJP?) sebesar 0,0609.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji kualitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linier antara variabel independen dalam suatu model regresi. Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila estimasi menghasilkan nilai R kuadrat yang tinggi (lebih dari 0,08) atau hampir semua variabel tidak signifikan (Gujarti dalam Basuki, 2017).

Tabel 5.5
Uji Multikolinearitas (*Correlation Matrix*)

	Pengeluaran Pemerintah	PDRB	Jumlah Penduduk
Pengeluaran Pemerintah	1.000000	0.688851	0.214635
PDRB	0.688851	1.000000	-0.396221
Jumlah Penduduk	0.688851	-0.396221	1.000000

Sumber: Hasil pengolahan data panel

Dari tabel 5.5, dijelaskan hasil uji dengan menggunakan *correlation matrix* dinyatakan tidak ada koefisien korelasi yang bernilai lebih besar dari 0,9 sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model yang digunakan dalam penelitian. Nilai hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB yaitu

sebesar 0,688851 dengan jumlah penduduk sebesar 0,214635. Selanjutnya nilai hubungan PDRB dengan pengeluaran pemerintah sama seperti pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan nilai hubungan PDRB dengan jumlah penduduk sebesar -0,396221.

D. Uji Statistik

1. Uji Parsial (t-statistik)

Tabel 5.6
Uji T-Statistik

Variabel	t-statistik	Koefisien Regresi	Prob	Stand.Prob
Pengeluaran Pemerintah	3.071079	0.646141	0.0030	0.05
PDRB	5.364143	2.309923	0.0000	0.05
Jumlah Penduduk	1.634789	1.824820	0.1063	0.05

Sumber: Hasil pengolahan data panel menggunakan Eviews 10.0

- a. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PAD berdasarkan pada hasil analisis didapatkan t-hitung sebesar 3,071079 dengan koefisien regresi 0,646141 dan probabilitas 0,0030 pada standar probabilitas 0,05. Koefisien bernilai positif dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 menjelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Surakarta. Koefisien regresi yang bernilai 0.646141 menjelaskan bahwa setiap kenaikan pada pengeluaran pemerintah 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0,646141%.
- b. Pengaruh PDRB terhadap PAD berdasarkan pada hasil analisis didapatkan hasil t-hitung sebesar 5,364143 dengan koefisien regresi 2,309923 dan probabilitas 0,0000 pada standar probabilitas 0,05. Koefisien yang bernilai positif dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 menjelaskan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di

Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Surakarta. Koefisien regresi yang bernilai 2,309923 menjelaskan bahwa setiap kenaikan pada PDRB 1% maka PAD akan meningkat sebesar 2,309923%.

- c. Pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD berdasarkan pada hasil analisis didapatkan hasil t-hitung sebesar 1,634789 dengan koefisien regresi 1,824820 dan probabilitas 0,1063 pada standar probabilitas 0,05. Koefisien yang bernilai positif dan probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menjelaskan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Surakarta. Koefisien regresi yang bernilai 1,634789 menjelaskan bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk 1% maka PAD akan meningkat sebesar 1,634789%.

2. Uji Simultan (F-statistik)

Uji simultan merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Berdasarkan pada pengolahan data panel dengan *Fixed Effect Model* diketahui nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 dengan standar probabilitas 0,05. Berdasarkan pada hasil probabilitas dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan variabel pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar model dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pada pengolahan data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,960935 yang artinya 96% variabel independen dalam model mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap

PAD dan 4% sisanya dipengaruhi oleh variabel independen lainnya diluar model penelitian ini.

E. Intepretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi model regresi data panel, selanjutnya melakukan analisis dan pembahasan pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk sebagai variabel independen terhadap PAD sebagai variabel dependen. Berikut analisis dan pembahasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta Tahun 2006-2017:

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengolahan data panel menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dari 7 Kabupaten/Kota bertanda positif dan signifikan terhadap PAD. Artinya apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah maka penerimaan daerah atas PAD meningkat. Koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 0,646141 berarti apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0,646141% dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan PAD memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0,0030 (kurang dari 0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Santosa & Rahayu, 2005) yang menyatakan variabel pengeluaran pembangunan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,398. Hubungan yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh terhadap perubahan PAD. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan memperbesar penerimaan PAD dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pengeluaran pemerintah maka PAD juga akan mengalami penurunan. Pengeluaran pemerintah daerah adalah pengeluaran rutin yang berfungsi untuk membiayai program pembangunan tertentu yang terwujud

dalam dana-dana pembiayaan. pengeluaran pembangunan merupakan sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata sehingga dapat mendorong perkembangan pada sektor-sektor perekonomian. Pada umumnya, pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

2. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD)

PDRB sangat penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil pengolahan data panel menunjukkan bahwa PDRB dari 7 Kabupaten/Kota bertanda positif dan signifikan terhadap PAD. Artinya apabila terjadi kenaikan PDRB maka penerimaan daerah atas PAD meningkat. Koefisien PDRB sebesar 2,309923 berarti apabila terjadi kenaikan PDRB 1% maka PAD akan meningkat sebesar 2,309923% dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan PAD memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0,0000 (kurang dari 0,05). Hubungan yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa PDRB sangat berpengaruh terhadap perubahan PAD. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hertanto, I., & Sriyana, J. (2011) yang menyatakan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan koefisien 5,151244 dan probabilitas 0,0000. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan yang fungsional karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Apabila

PDRB meningkat maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, meningkatnya sarana dan prasarana pada pelayanan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktifitasnya (Santosa & Rahayu, 2005).

3. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD)

Penduduk merupakan orang yang tinggal tetap di suatu daerah dan secara hukum berhak untuk tinggal di daerah tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data panel menunjukkan bahwa jumlah penduduk dari 7 Kabupaten/Kota bertanda positif namun tidak signifikan terhadap PAD. Koefisien jumlah penduduk sebesar 1,824820 berarti apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk 1% maka PAD akan meningkat sebesar 1,824820% dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan. Nilai probabilitas sebesar 0,1063 pada tingkat signifikansi 0,05. Artinya jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan dengan nilai koefisien jumlah penduduk sebesar 0,009983 dan nilai probabilitas 0,3019 dengan nilai signifikansi $0,3019 > 0,05$.

Pendapatan daerah diperoleh dari aktivitas penduduk dalam perekonomian seperti penarikan pajak, retribusi dan sebagainya. Apabila jumlah pengangguran suatu daerah tinggi maka pendapatan yang diterima akan menurun karena adanya jumlah penduduk yang belum bekerja didalam perekonomian yang dapat menyebabkan penurunan dalam pembayaran pajak. Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam PAD. Jumlah pengangguran suatu daerah tinggi maka akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian pada waktu tertentu yang akan berdampak langsung terhadap perolehan sumbangan pajak pendapatan

penduduk ke pemerintah daerah. Pembiayaan daerah rendah disebabkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis dan belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian. Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Surakarta.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien 0,646141 dengan probabilitas 0,0030. Hal ini terjadi karena besarnya pengeluaran digunakan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas layanan publik yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.
2. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien 2,309923 dengan probabilitas 0,0000. Hal ini terjadi karena peningkatan PDRB dari tahun 2006 sampai dengan 2017 diikuti dengan peningkatan PAD tahun 2006 sampai dengan 2017.
3. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien 1,824820 dengan probabilitas 0,1063. Hal ini terjadi karena masih banyak penduduk yang menganggur/belum bekerja dalam perekonomian yang menyebabkan penurunan dalam aktivitas perekonomian seperti pembayaran pajak.

B. Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan PDRB, PDRB meningkat maka akan menambah penerimaan daerah
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dari anggaran belanja daerah. Pemerintah daerah harus lebih bijaksana mengutamakan pembangunan daerah terutama dalam memberikan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan dan pengembangan sumber daya manusia agar merata.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2005. "Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6(5), 26-30.

Andriana, A. (2012). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2007. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(1).

Aryanti, E., & Indarti, I. (2012). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis*, 1(1).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2018). *Jawa Tengah dalam angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2018). *Surakarta dalam angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. (2018). *Sragen dalam angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. (2018). *Boyolali dalam angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. (2018). *Karanganyar dalam angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. (2018). *Klaten dalam angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. (2018). *Sukoharjo dalam angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2018). *Wonogiri dalam angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. (2017). *Sragen dalam angka 2017*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. (2016). *Klaten dalam angka 2016*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. (2016). *Boyolali dalam angka 2016*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. (2016). *Karanganyar dalam angka 2016*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. (2016). *Sukoharjo dalam angka 2016*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2016). *Wonogiri dalam angka 2016*.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2015). *Surakarta dalam angka 2015*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. (2015). *Karanganyar dalam angka 2015*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2015). *Wonogiri dalam angka 2015*.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2014). *Surakarta dalam angka 2014*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. (2011). *Boyolali dalam angka 2011*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. (2011). *Sukoharjo dalam angka 2011*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2011). *Wonogiri dalam angka 2011*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. (Edisi Tahun 2012-2010). *Karanganyar dalam angka*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. (Edisi Tahun 2012-2008). *Klaten dalam angka*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (Edisi Tahun 2010-2007). *Jawa Tengah dalam angka*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. (2008). *Sragen dalam angka 2008*.

Bank Indonesia. (2016). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah*.

Basuki, A. T. (2017). *Ekonometrika dan Aplikasi dalam Ekonomi (Dilengkapi Aplikasi Eviews 7)*. Yogyakarta: Danisa.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). ANALISIS REGRESI DALAM PENELITIAN EKONOMI & BISNIS (DILENGKAPI APLIKASI SPSS & EIEWS). Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Halim, Abdul. 2004. *“Akutansi Keuangan Daerah”*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Haryanto, J. T. (2017). Mapping the Local Own Resources (PAD) Performance and Regional Dependence in Indonesia 2008-2014. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 9(1), 41-52.

Hertanto, I., & Sriyana, J. (2011). Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 12(1), 76-89.

Hudiyanto. 2015. *“Ekonomi Pembangunan”*. Yogyakarta: Lingkar Media.

Jhingan, L.M. 1975. *“Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.”* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mankiw, N. Gregory. (2006). *Pengantar ekonomi makro*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Ketiga.

Pelealu, A. M. (2013). Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota Manado tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Prana, R. R. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1).

Priyono, N. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS DI KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2001-2010). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 1(1), 13-26.

RANI, H. F. S. E. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Periode 2005-2014).

Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1), 9-18.

Sari, P. L. P. (2013). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. *JINAH (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika)*, 2(2).

Triyanto, D., Wahyudi, S. T., & Ananda, C. F. (2017). The Effect of Capital Expenditure on Local Revenue: Study in East Java Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2).

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Yani, Ahmad. 2002. "Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.